

# SEJARAH PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI INDONESIA

Nurlidiawati\*

**Pengutipan:** Nurlidiawati. (2014). Sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 1, hlm. 18-27.

\* Dosen Jurusan Ilmu  
Perpustakaan UIN Alauddin  
Makassar

Email :  
nurlidiawatiahyar@yahoo.com

## ABSTRACT

*Libraries in Indonesia have been established since the time of Majapahit, which then, according to the ebb and flow of Indonesian history. The development of the library at the time marked by the royal library cultivated a more religious and feudalistic. In the Dutch colonial era, libraries had been used as a vehicle to perform the occupation. Receding rapidly developing libraries in Indonesia occurred at the time of the Japanese. Later, a few years after Indonesian Independence Proclamation, libraries in Indonesia were gradually developed. In the New Order Era, library development had become one of the sub development outlined in REPELITA (Indonesian Development Plans for the next 5 years).*

**KEY WORDS:** Sejarah perpustakaan Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan pranata masyarakat. Oleh karena itu jika kita berbicara tentang perkembangan perpustakaan, khususnya di Indonesia, maka ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan peradabannya. Sejarah perpustakaan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan peradaban. Sesuai dengan sejarah peradaban bangsa Indonesia, maka keberadaan perpustakaan di Indonesia tergolong masih mudah dibanding dengan di negara-negara Eropa dan Arab. Awal mula perpustakaan di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, namun ada yang menyatakan bahwa lahirnya perpustakaan di Indonesia seiring dengan dikenalnya sistem tulisan, tapi pada akhirnya pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Perjalanan panjang sejarah telah mencatat bahwa Indonesia mengalami pasang surut dalam membangun peradabannya. Diawali dengan adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain terutama India Selatan dan Cina. Hubungan ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia baik dari segi ekonomi, budaya, maupun agama.

Terjalannya hubungan dagang tersebut, yang menyebabkan masyarakat Indonesia mulai mengenal agama Hindu dan Budha yang berasal dari India Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu Budha di beberapa wilayah di Indonesia. Tingginya peradaban dan besarnya kekuatan Nusantara pada waktu itu, telah membawa pengaruh yang kuat terhadap perkembangan kebudayaan, dan perkembangan kebudayaan inilah yang mendorong adanya embrio-embrio perpustakaan di Nusantara. Karena

pada saat itu kebutuhan akan pelestarian budaya dan keagungan bangsa mulai dirasakan sehingga usaha-usaha untuk menuangkan budaya dan keagungan itu dalam bentuk tertulis mulai dilakukan.

Membahas tentang sejarah perpustakaan di Indonesia tidaklah mudah karena ternyata perkembangannya seiring dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perkembangan perpustakaan di Indonesia dapat dibedakan dalam lima (5) periode yaitu: *pertama* periode sebelum zaman penjajahan (kerajaan-kerajaan lokal), *kedua* periode penjajahan Hindia Belanda, *ketiga* periode penjajahan Jepang, *keempat* periode sesudah kemerdekaan, dan *kelima* periode orde baru.

## 2. PERIODESASI PERPUSTAKAAN DI INDONESIA

### a. Zaman Kerajaan Lokal

Kepastian bahwa kapan perpustakaan didirikan secara resmi di Indonesia, khususnya pada periode sebelum penjajahan atau periode kerajaan lokal ada beberapa pendapat baik dari sejarawan maupun dari pustakawan Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa awal mula perpustakaan di Indonesia ditandai dengan dikenalnya sistem tulisan. Pendapat ini tidak banyak yang membenarkan dengan alasan bahwa institusi berupa perpustakaan tidak selalu dikaitkan dengan pengenalan tulisan, walaupun nantinya perpustakaan fungsinya untuk menyimpan seperti tulisan pada lontar dan papyrus.

Dengan demikian, jika awal perpustakaan dikaitkan dengan tulisan, berarti sejarah perpustakaan di Indonesia dimulai sejak ditemukannya beberapa prasasti yang dipahat di atas tiang batu di kerajaan Kutai (Kalimantan Timur) pada abad ke-5 M. Tiang batu itu disebut dengan *Yupa*. Huruf yang dipakai pada yupa ini adalah huruf pallawa (huruf India Selatan) dan bahasanya Sansekerta, isinya tentang raja Kutai. Tulisan tersebut tidak disimpan di sebuah tempat

melainkan dipancangkan di tempat yang terbuka agar terlihat oleh rakyat.

Bila berpedoman pada definisi bahwa perpustakaan adalah *sebuah ruangan, bagian atau sub-bagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota perpustakaan*. Karena itu, pendapat atau anggapan bahwa Indonesia telah mengenal perpustakaan sejak zaman kerajaan Kutai tidak dapat diterima (Sulistyo-Basuki, 1994).

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa perpustakaan sudah mulai dikenal di Indonesia sejak zaman kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 692 M. Pendapat para pustakawan tersebut umumnya tidak ditunjang oleh penelitian yang mendalam, hanya berdasarkan asumsi bahwa Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar pada masa lalu sehingga dianggap pasti memiliki perpustakaan. Hal ini didukung oleh adanya informasi dari seorang musafir I-tsing dari Cina menyatakan bahwa sekitar tahun 695 M di ibukota kerajaan Sriwijaya hidup lebih dari 1.000 orang biksu. Di samping tugas keagamaan, biksu ini bertugas mempelajari agama Budha melalui berbagai buku. Jika dikaji lebih lanjut, tentunya seribu biksu itu memerlukan buku agama Budha yang masih ditulis tangan dan disimpan di berbagai biara. Bila hal ini benar, maka mungkin saja waktu itu sudah ada perpustakaan dengan alasan naskah agama Budha disimpan di sebuah tempat serta digunakan oleh para pemakai (para biksu). Pendapat bahwa di zaman kerajaan Sriwijaya telah ada perpustakaan lebih berdasarkan pada analogi daripada penelitian.

Setelah Sriwijaya (di Palembang), kemudian muncul berbagai kerajaan di pulau Jawa seperti: kerajaan Mataram pada abad ke-6 yang mula-mula berpusat di Jawa Tengah kemudian pindah ke Jawa Timur, pada masa itu, mulai dikenal pujangga keraton yang menulis berbagai karya sastra. Yang pertama adalah naskah *Sang Hyang Kamahayanikan*

yang memuat uraian tentang agama Budha Mahayana. Selanjutnya muncul dua buah kitab keagamaan yaitu kitab *Brahmandapurana* dan *Agastyaparwa*. Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya. Selanjutnya kerajaan Kediri, kerajaan Singhasari, dan kerajaan Majapahit.

Pada zaman Majapahit, ditulis berbagai naskah, misalnya Mpu Prapanca mengarang buku *Negarakertagama* sedangkan Mpu Tantular menulis buku *Sutasoma*. Tercatat pula karangan-karangan lain seperti *Kidung Harsawijaya*, *kidung Ranggalawe*, *Sorandaka*, dan *Sundayana*. Umumnya naskah tersebut disimpan di keraton. Jika dilihat dari segi perpustakaan, benarkah ada perpustakaan keraton pada saat itu?

Kegiatan penulisan dan penyimpanan naskah masih dilanjutkan oleh para raja dan sultan yang tersebar di Nusantara. Misalnya zaman kerajaan Demak, Banten, Mataram, Surakarta, Pakualaman, Mangkunegoro, Cirebon, Melayu, Jambi, Mempawah, Makassar, Maluku, dan Sumbawa. Cirebon adalah salah satu penghasil buku terbanyak sehingga Cirebon dapat dikatakan sebagai pusat perbukuan pada masanya. Umumnya buku-buku tersebut disimpan di istana, tentunya menimbulkan rasa ingin tahu bagaimana penyusunan buku-buku tersebut serta adakah katalognya? Sayangnya tidak ada sumber yang menjelaskan kepastian tentang itu, namun banyak dugaan bahwa pada saat itu sudah ada perpustakaan dan katalog.

Tradisi budaya Indonesia yang lebih mementingkan budayah lisan daripada tulisan menyulitkan peneliti untuk membuktikan penelitiannya secara akurat mengenai perpustakaan pada zaman kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara (Sulistyo-Basuki, 1994).

## b. Zaman Penjajahan Hindia Belanda

Perang salib yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun harta di kedua belah pihak yang berperang, tetapi juga menyebabkan terjadinya

penjajahan yang mengakibatkan penderitaan bagi negara yang terjajah. Semangat imperialisme tumbuh pada bangsa-bangsa Eropa untuk memperluas daerah jajahannya karena beberapa faktor diantaranya:

- 1) Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 yang mengakibatkan terputusnya hubungan dagang antara Eropa dengan Asia Barat. Sebelum dikuasai oleh bangsa Turki, Konstantinopel dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di sekitar laut Tengah.
- 2) Pada saat itu terjadi krisis ekonomi dan kekurangan bahan makanan melanda daratan Eropa, harga rempah-rempah dan bahan mentah lainnya sangat mahal.
- 3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ditemukannya kompas dan senjata. Kompas berfungsi sebagai penunjuk arah pelayaran.
- 4) Adanya buku *Imago Mundi* yang berisi kisah perjalanan Marcopolo. Buku tersebut menceritakan tentang dunia Timur yang kaya dengan emas dan rempah-rempah.
- 5) Adanya semangat *reconquista* yaitu semangat pembalasan bangsa Eropa terhadap kekuasaan Islam.

Sekitar awal abad ke-16 orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Nusantara, diawali oleh kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1510. Pada tahun 1512, imperialisme Portugis mulai ditanamkan di Indonesia dengan semboyan "*gold, gospel, and glory*" artiya mencari emas, kekuasaan, dan sekaligus menyebarkan agama kristen. Selanjutnya disusul oleh bangsa Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol, Belanda, dan Jepang.

Bangsa Belanda mengetahui jalan menuju Indonesia melalui petunjuk *Jan Huygen Van Liushoten*, orang Belanda yang pernah bekerja pada Portugis dan pernah sampai di Indonesia. Bangsa Belanda kemudian melakukan pelayaran menuju Indonesia melalui jalan utara untuk menghindari armada Portugis. Awalnya bangsa Belanda

gagal karena terhalang oleh salju di daerah kutub utara. Untuk melanjutkan usahanya, beberapa pengusaha Belanda membentuk perkumpulan dagang yang disebut dengan *Compagnie van Verre*. Mereka kemudian melanjutkan pelayarannya ke Nusantara yang dipimpin oleh *Cornelisz de Houtman* dan *Pieter Keyger* pada tahun 1596.

Pelayaran untuk mencapai Nusantara ternyata tidaklah mudah, pelayaran melalui Tanjung Harapan menuju selat Sunda. Setelah menempuh perjalanan sekitar satu tahun, mereka akhirnya sampai di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Sikap sombong dan angkuh orang-orang Belanda ini menyebabkan mereka diusir dari Banten. Mereka terpaksa berlayar ke Timur sampai di Madura. Di Madura, mereka juga berselisih dengan para pedagang di sana, sehingga mereka terpaksa harus diusir dan mencari daerah lainnya.

Mereka kemudian berlayar menuju Maluku, selanjutnya tiba di Bali melalui selat Sunda. Kedatangan bangsa Belanda di Banten yang kedua kalinya, mereka bersikap bersahabat sehingga disambut baik oleh masyarakat. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan untuk memborong rempah-rempah. Orang-orang Eropa yang datang di Indonesia, selain mencari rempah-rempah mereka juga giat menyebarkan agama Kristen terutama di Indonesia bagian Timur. Penyebaran agama ini biasanya diikuti dengan pembanguana fisik gedung gereja. Pembangunan gereja ini selalu disertai dengan penyediaan berbagai buku keagamaan seperti injil, mazmur, dan buku-buku do'a lainnya. Karena keterbatasan buku, maka buku-buku semacam ini tidak dipinjamkan tetapi hanya boleh dibaca di gereja atau gedung yang berdekatan dengan gereja. Namun koleksi tersebut belum dapat disebut perpustakaan karena buku-buku disusun secara sederhana orientasinya hanya untuk pengajaran, jumlahnya relatif kecil, serta pemakaiannya sangat terbatas (Nurhadi, M.A., 1983).

Berdasarkan sumber sekunder, perpustakaan yang pertama didirikan pada zaman Hindia

Belanda adalah sebuah perpustakaan gereja di Batavia (Jakarta) perpustakaan ini telah dirintis sejak tahun 1624. Karena berbagai kesulitan, sehingga perpustakaan ini baru diresmikan pada tanggal 27 April 1643. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan tertua yang didirikan oleh Belanda untuk memperkuat usaha penjajahannya di Indonesia.

Perpustakaan gereja Batavia (Jakarta) pada waktu itu meminjamkan buku untuk perawat rumah sakit Batavia, bahkan peminjaman buku diperluas sampai ke Semarang dan Juana (Jawa Tengah). Jadi dapat dikatakan bahwa pada abad ke-17 Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan.

Berita tentang kegiatan perpustakaan gereja Batavia tidak lagi kedengaran. Lebih seratus tahun kemudian berdirilah perpustakaan khusus di Batavia pada tanggal 24 April 1778, yang disebut dengan "*Bataviaasche Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen (BGKW)*" yang diprakarsai oleh Mr. J.C.M. Rademaker (dewan Hindia Belanda). Berdirinya perpustakaan atau lembaga ini, atas sumbangan-sumbangan dari para dermawan hingga tahun 1844. Kemudian pada tahun 1846 perpustakaan tersebut mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia dengan judul *Bibliotecae Artiumcientiaerumquae Batavia Floret Catalogue Systematicus* hasil suntingan P. Bleeker. Edisi kedua terbit pada tahun 1848 dalam bahasa Belanda.

Koleksi-koleksinya diperoleh dari lembaga-lembaga penerbitan ilmiah di negeri Belanda dan dari hasil pembelian yang dananya diberikan oleh gubernur jenderal di Indonesia. Sebagian besar isi koleksi itu tentang:

- 1) *Etnologi* (ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk masalah kebudayaan dari suku bangsa suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif dengan tujuan mendapatkan informasi tentang sejarah dan perkembangan serta penyebaran kebudayaan).

- 2) *Antropologi* (ilmu yang mempelajari tentang asal usul manusia, kepercayaannya, bentuk fisik, warna kulit, dan budayanya di masa silam).
- 3) *Arkeologi* (ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan kebudayaan kuno, ilmu yang mempelajari peninggalan-peninggalan bersejarah).

Karena prestasinya yang luar biasa dalam meningkatkan ilmu dan kebudayaan, maka namanya ditambah menjadi *Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen*. Nama lembaga ini berubah pada tahun 1950 menjadi lembaga kebudayaan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1962 lembaga kebudayaan Indonesia diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, dan namanya pun berubah menjadi Museum Pusat. Koleksi perpustakaan menjadi bagian dari Museum Pusat dan dikenal dengan nama Perpustakaan Museum Pusat. Museum ini kemudian berubah lagi namanya menjadi Museum Nasional, sedangkan perpustakaannya dikenal sebagai Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980 perpustakaan ini dilebur ke pusat pembinaan perpustakaan. Perubahan lagi terjadi pada tahun 1989 tatkala pusat pembinaan perpustakaan dilebur sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Untuk memperkuat kekuasaan atau penjajahannya di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda mendirikan berbagai lembaga baik lembaga penelitian maupun lembaga pemerintahan di beberapa kota di Indonesia. Contoh, pada tahun 1842 telah dibangun *Bibliotheek's Lands Plantentuin te Buitenzorg* di Jakarta. Pada tahun 1911 namanya berubah menjadi *Central Natuurwetenschap-pelijke Bibliotheek van het Department van Landbouw, Nijverheid en Handel*. Namanya kemudian berubah menjadi *Bibliotheca Bogoriensis*. Tahun 1962 berubah menjadi pusat perpustakaan penelitian teknik pertanian dan pusat perpustakaan biologi dan pertanian. Kini namanya menjadi perpustakaan pusat

pertanian dan komunikasi penelitian (Sulistyo-Basuki, 1994).

Sedangkan di Bandung telah didirikan perpustakaan negara Pasteur pada tahun 1890, balai hidrologi dan hidrometri pada tahun 1914, dan observatorium bosscha pada tahun 1920, yang kemudian menjadi lembaga *astronomi Lembang*. Pendirian lembaga-lembaga dan balai tersebut juga diikuti dengan perpustakaan masing-masing.

*Volksbibliotheek* atau perpustakaan rakyat yang didirikan oleh *Volkslectuur* kelak berubah menjadi Balai Pustaka. Sejak tahun 1910 Balai Pustaka tidak hanya menerbitkan buku cerita saja tetapi juga buku-buku pengetahuan populer. Majalah juga sudah mulai diterbitkan dengan judul *Panji Pustaka* untuk yang berbahasa Melayu, *Kejawen* dengan bahasa Jawa, dan *Parahiyangan* dalam bahasa Sunda. Pada tahun 1913 mulai diperkenalkan peraturan karya cetak dengan peraturan pemerintah no. 19 yang dimuat dalam *staatsblad* no. 7981. Peraturan itu berisi tentang dua hal, yaitu:

- 1) Pemerintah setempat diminta untuk menyerahkan semua karya cetak baik yang berupa buku, majalah, Koran, peta, dan sebagainya, yang sejak tahun 1856 dikumpulkan dan yang dinyatakan telah lolos dari sensor kepada direksi *Bataviassch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*.
- 2) Departemen dan instansi, serta dinas diminta menyerahkan semua hasil karya tulis yang telah disebar luaskan dalam bentuk penerbitan kepada direksi lembaga tersebut (Nurhadi, M.A., 1983).

Karena peraturan itu, kemudian perpustakaan museum pusat menjadi perpustakaan terbesar dan terlengkap koleksinya di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengembangkan perpustakaan umum di beberapa kota di Indonesia yang disebut dengan *volksbibliotheek* yang berfungsi sebagai taman bacaan untuk rakyat. Dengan berdirinya taman bacaan ini kemudian disusul dengan munculnya toko-toko buku

atau penerbit yang menyewakan buku untuk masyarakat luas.

### c. Zaman Penjajahan Jepang

Berbeda dengan situasi zaman Hindia-Belanda, sumber mengenai keadaan dan fungsi perpustakaan pada zaman Jepang hampir dikatakan tidak ada. Karena ketika itu suasana Indonesia adalah dalam suasana perang. Tatkala tentara Jepang menyerbu kota Batavia pada tahun 1942, mereka tidak mengalami hambatan karena Batavia sudah dinyatakan kota terbuka. Pasukan Jepang segera mengamankan berbagai gedung penting yang dianggap strategis, diantaranya gedung Museum Nasional, dan gedung kuliah *rechts hoogeschool*. Berkat pengamanan gedung tersebut, maka ribuan koleksi buku yang ada di gedung tersebut selamat hingga perang selesai.

Selama pendudukan Jepang, *openbare leeszaal* (ruang baca terbuka atau ruang baca umum) ditutup, sedangkan pengurusannya yang umumnya orang Belanda dimasukkan ke dalam tahanan militer. Akibatnya perpustakaan ditutup. Pada saat Jepang membuka kembali sekolah, semua buku-buku yang berbahasa Belanda dilarang beredar, yang ada hanyalah buku berbahasa melayu dan bahasa daerah. Namun selang waktu beberapa bulan sebelum sekolah dibuka kembali, gedung sekolah maupun perpustakaan sudah dijarah rakyat. Hasilnya ialah *volksbibliotheek* (perpustakaan rakyat) lenyap dari muka bumi. Ketika Jepang membuka sekolah tinggi, misalnya sekolah tinggi pelayaran dan kedokteran. Ini berarti kuliah harus dilanjutkan dan berarti pula memerlukan buku. Kendati kuliah dilanjutkan, buku pelajaran yang berbahasa Belanda dilarang digunakan, namun mahasiswa masih dapat menggunakan buku teks dalam bahasa asing lainnya (Nurhadi, Muljani A., 1983).

Pemerintah Jepang membuka kembali berbagai badan dan lembaga dengan tujuan utama membantu mesin perang Jepang. Buku-buku yang boleh beredar hanyalah

buku berbahasa asing dan koleksi yang bernafaskan politik Jepang yang beredar di perpustakaan, terkecuali buku yang berbahasa Belanda. Jadi dapat dikatakan bahwa pada zaman penjajahan Jepang, buku-buku berbahasa Belanda dilarang beredar bahkan perpustakaan-perpustakaan khusus yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dibekukan atau tidak difungsikan sama sekali.

### d. Zaman Sesudah Kemerdekaan

Berbeda dengan zaman Hindia Belanda, pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, perpustakaan tidak banyak mendapat perhatian. Hal ini dapat dimaklumi karena situasi pada waktu itu adalah situasi pemulihan dari masa peperangan ke situasi kedamaian. Walaupun kemerdekaan sudah diproklamasikan, namun rongrongan dari luar masih terus dilakukan sehingga pertahanan dan semangat patriotisme menjadi hal nomor satu yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Semua kegiatan pemerintah telah dipusatkan untuk menata kembali sistem pemerintahan sendiri oleh Republik Indonesia yang sebelumnya ada campur tangan oleh bangsa lain alias bangsa penjajah. Usaha untuk mengumpulkan kembali bahan pustaka oleh para pemuda yang sempat mengenyam pendidikan, para ahli dan politikus. Hanya saja pemanfaatan koleksi tersebut masih sangat terbatas dan tidak efektif.

Setelah keadaan negara tertata kembali dan suasana pemerintah Republik Indonesia sudah mulai stabil, kebutuhan akan perpustakaan sudah mulai dirasakan. Karena itulah kemudian pemerintah mulai merintis dan menghidupkan kembali perpustakaan-perpustakaan yang selama penjajahan Jepang sampai awal kemerdekaan tidak mendapat perhatian. Hal ini lebih tampak sesudah tahun 1950-an sewaktu Indonesia mengembangkan pembinaan "*nation and character building*". Perpustakaan telah dibanjiri dengan buku-buku tentang doktrin pembinaan bangsa dan politik negara. Usaha untuk menghidupkan dan mengembangkan kembali perpustakaan

pada masa ini ditandai dengan didirikannya berbagai perpustakaan baru. Diantaranya adalah didirikannya perpustakaan yayasan Hatta (Hatta foundation) pada tanggal 25 Agustus 1950 dengan akte notaris No. 10. Perpustakaan ini didirikan oleh yayasan swasta yang meniti beratkan pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia yang bercorak ketimuran, membantu perkembangan penerbitan nasional, memberikan beasiswa untuk belajar dan membantu menyelenggarakan laboratorium guna untuk kemajuan ilmu pengetahuan (Nurhadi, Muljani A., 1983).

Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 1952 didirikan perpustakaan "*Stichting voor culturele samenwerking*", suatu badan kerjasama kebudayaan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda, dan diserahkan kepada pemerintah RI. Kemudian pemerintah RI mengubah namanya menjadi "*perpustakaan sejarah politik dan sosial Departemen P&K*". Perpustakaan ini mempunyai koleksi yang banyak, dan sebagian besar meliputi bidang sosial, politik, perkembangan ekonomi, sosialisme, hukum internasional, undang-undang dasar berbagai negara, dan masalah diplomasi. Jumlah koleksinya pada saat itu telah mencapai 15.000 buku. Perpustakaan ini tergolong salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia pada zaman tersebut.

Salah satu usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan buta huruf di seluruh pelosok tanah air, yaitu didirikannya perpustakaan rakyat yang bertugas untuk membantu usaha jawatan pendidikan masyarakat. Pembentukan perpustakaan ini berdasarkan surat keputusan Menteri P&K no. 7870/ Kab. Pada tanggal 05 Maret 1957. Ada 3 macam perpustakaan rakyat yang didirikan pada waktu itu yakni :

1) Perpustakaan rakyat tingkat A, yaitu koleksinya disiapkan untuk masyarakat yang berpengetahuan setingkat Sekolah Dasar, dan ini didirikan di tingkat kecamatan.

- 2) Perpustakaan rakyat tingkat B, yang didirikan di setiap ibu kota kabupaten dan koleksinya untuk masyarakat yang berpendidikan setingkat SMTP.
- 3) Perpustakaan rakyat tingkat C, yang didirikan di setiap Ibu Kota Provinsi dan koleksinya dipersiapkan untuk masyarakat yang berpendidikan setingkat SMTA.

Karena usaha pemberantasan buta huruf lewat jawatan pendidikan masyarakat ini mendapat prioritas utama pemerintah RI, maka perkembangan perpustakaan rakyat sebagai perpustakaan umum ini sangat menggembirakan. Namun setelah tahun 1961 keadaannya menjadi menurun ketika terjadi perubahan struktur organisasi kementerian P & K. Koleksinya menjadi tidak terurus, dan pengelolanya juga sudah banyak yang harus berpindah tugas.

Keseriusan pemerintah RI untuk terus mengembangkan perpustakaan di Indonesia pada waktu itu, ditandai dengan lahirnya perpustakaan negara yang berfungsi sebagai perpustakaan umum, yang didirikan di ibukota provinsi. Perpustakaan-perpustakaan negara yang pernah didirikan di Indonesia adalah:

- Perpustakaan negara di Yogyakarta didirikan pada tahun 1949.
- Perpustakaan negara di Ambon yang didirikan pada tahun 1952.
- Bandung pada tahun 1953.
- Ujung Pandang pada tahun 1954.
- Padang pada tahun 1956.
- Palembang 1957.
- Jakarta pada tahun 1958.
- Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru, dan Surabaya pada tahun 1959.
- Banjarmasin pada tahun 1960.
- Manado pada tahun 1961.
- Kupang dan Samarinda pada tahun 1964.

Perpustakaan-perpustakaan negara ini dikembangkan secara lintas oleh tiga instansi yaitu:

- 1) Biro perpustakaan Departemen P & K yang membina secara teknis.
- 2) Perwakilan Departemen P & K membina secara administrative.
- 3) Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang menyiapkan dan memberikan fasilitas-fasilitasnya.

Biro perpustakaan Departemen P & K didirikan dengan surat keputusan Menteri P & K pada tanggal 15 Februari 1951 no. 4223/kab. di Jakarta, tetapi baru efektif nanti pada tahun 1954. Tugas biro ini adalah untuk menyelenggarakan perpustakaan bagi pemerintah, dan mengumpulkan karya cetak Indonesia. Biro ini yang kemudian menjadi pusat pembinaan perpustakaan Departemen P & K yang tugasnya menjadi lebih luas lagi dalam rangka pengembangan perpustakaan secara nasional.

Periode ini juga sudah mulai dilansirkan gagasan tentang perpustakaan nasional. Dengan surat keputusannya no.110/1/1962 menteri P & K telah membentuk tim yang diberi tugas untuk mempersiapkan berdirinya perpustakaan nasional. Surat keputusan tersebut diperbaharui lagi dengan surat putusan No. 38/1964 tanggal 12 Mei 1964. Tetapi karena situasi Indonesia pada saat itu sedang terjadi perubahan politik pada bulan Oktober 1965, yakni meletusnya G 30 S PKI, maka proyek rencana pemerintah untuk mendirikan perpustakaan nasional dihentikan (Nurhadi, Muljani A, 1983).

#### **e. Zaman Orde Baru**

Empat tahun pertama pemerintahan orde baru harus bekerja keras dalam rangka pemulihan pertahanan dan keamanan dalam negeri pasca G 30 S PKI berhasil ditumpas. Dengan demikian pembangunan di sektor budaya kurang mendapat perhatian pemerintah. Pada pelita I, pemerintah

berusaha mengembalikan kekuatan ekonomi negara dengan memberikan prioritas pengembangan di sektor ekonomi dengan cara memperbanyak usaha produktif dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif. Pengembangan perpustakaan pada periode ini tidak begitu menonjol, yang tampak hanya usaha untuk mempertahankan agar perpustakaan-perpustakaan yang sudah berdiri tetap berlangsung dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Adapun perpustakaan-perpustakaan negara yang sedang berkembang tetap dibina oleh pusat pembinaan perpustakaan walaupun dana terbatas.

Setelah Pelita I berhasil meningkatkan pendapatan negara, yang ditunjang dari hasil devisa minyak bumi, maka pengembangan sektor budaya dan sosial lainnya mulai mendapat perhatian. Pada Pelita II, perpustakaan kembali mendapat perhatian yang lebih sehingga proyek-proyek pengembangan perpustakaan mulai dilaksanakan. Melalui pusat pembinaan perpustakaan proyek-proyek tersebut banyak dilakukan seperti: pembelian buku-buku untuk perpustakaan negara meningkat, pengembangan sayap pelayanan perpustakaan negara ditingkatkan, dan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang selama itu kurang mendapat perhatian telah mulai dibina. Sampai pada akhir Pelita II pusat pembinaan perpustakaan telah berhasil membuka 11 proyek perintis perpustakaan sekolah di 11 ibukota Provinsi, tujuannya adalah untuk difungsikan sebagai model percontohan perpustakaan sekolah yang kemudian dikembangkan di provinsinya masing-masing. Proyek ini dimulai pada tahun 1975-1976.

Sejak akhir Pelita I sampai pada akhir Pelita II, proyek pengadaan buku dan penerbitan buku-buku paket untuk sekolah baik SD, SMP, maupun SMA terus diadakan. Penyebaran buku-buku paket secara cuma-cuma ke sekolah di seluruh pelosok tanah air telah mendorong untuk diselenggarakannya perpustakaan sekolah secara menyeluruh, dengan demikian itulah cikal bakal



perpustakaan-perpustakaan sekolah mulai bermunculan di mana-mana walaupun pada taraf yang masih sangat sederhana (Nurhadi, Muljani A, 1983).

Pada awal Pelita III sudah dapat dilihat banyak perpustakaan sekolah yang sudah baik dan telah memenuhi syarat sebagai sarana belajar dan mengajar. Bukan hanya perpustakaan sekolah SD, SMP, dan SMA yang mengalami perkembangan, perpustakaan perguruan tinggi pun juga terjadi kemajuan. Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan no. 011/DJ/Lep/1977 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang diberi tugas untuk membantu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam menangani program-program pengembangan perpustakaan perguruan tinggi.

Sejak terbentuknya satgas itulah kemudian secara nasional pengembangan perpustakaan perguruan tinggi menjadi lebih terarah, itu dimulai sejak tahun 1978. Peranan perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis di perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi lebih jelas. Selain perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi yang mengalami perkembangan, perpustakaan-perpustakaan negara yang sudah berdiri sejak tahun 1979 telah ditingkatkan menjadi perpustakaan wilayah yang berfungsi sebagai "perpustakaan deposit" di tingkat propinsi dengan tugas utamanya adalah:

- 1) Menjadi tempat deposit karya cetak di propinsi masing-masing.
- 2) Menerbitkan bibliografi hasil karya di daerah masing-masing.
- 3) Membina dan mengembangkan perpustakaan umum yang tumbuh di lingkungan propinsi masing-masing.

Dengan diresmikannya perpustakaan wilayah ini, kemudian selanjutnya didirikan pula

berbagai perpustakaan umum di tingkat kabupaten seperti *perpustakaan keliling dan perpustakaan desa*. Pada pertengahan tahun 1980 telah berdiri 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten, 19 perpustakaan wilayah, 305 perpustakaan desa, dan 16 perpustakaan keliling. Berdasarkan data dari pusat pembinaan perpustakaan, bahwa pada akhir Pelita III, perpustakaan umum di tingkat kabupaten ditingkatkan menjadi 200 buah, sedangkan perpustakaan wilayah ditingkatkan menjadi 26 buah.

Selain perpustakaan-perpustakaan umum, perpustakaan khusus pun juga bertambah besar dan koleksinya semakin bertambah. Perpustakaan-perpustakaan khusus seperti; perpustakaan pusat Pertamina di Jakarta, perpustakaan Balai Penelitian Kulit di Yogyakarta, dan perpustakaan Batan di Yogyakarta, perpustakaan Lemigas di Jakarta, dan lain-lain (Nurhadi, M. A., 1983).

Pada tahun 1978/1979 tim yang dipimpin oleh Prof. Selo Sumardjan telah berhasil merumuskan sistem perpustakaan nasional yang menjadi dasar konsep pembentukan perpustakaan nasional di Indonesia. Setelah mengalami berbagai proses dan pembahasan tingkat nasional, pada akhir tahun 1980 didirikanlah perpustakaan nasional yang merupakan peleburan dari: *perpustakaan museum pusat, perpustakaan sejarah, politik dan sosial, bagian bibliografi dan deposit pada pusat pembinaan perpustakaan, dan perpustakaan wilayah daerah khusus ibukota Jakarta*. Catatan penting yang harus diingat bahwa pada periode ini telah diterbitkan buku-buku pedoman perpustakaan. Buku-buku pedoman itu antara lain:

- Buku pedoman/standar perpustakaan perguruan tinggi.
- Buku pedoman/standar perpustakaan sekolah.
- Buku pedoman/standar perpustakaan khusus.
- Buku pedoman/standar perpustakaan umum.
- Pedoman/standar mebeler perpustakaan

- Perpustakaan sekolah; petunjuk untuk membina, memakai dan memelihara perpustakaan sekolah. Semuanya diterbitkan oleh proyek pengembangan perpustakaan pada pusat pengembangan perpustakaan Departemen P & K pada tahun 1978 dan 1979 (Nurhadi, Muljani A., 1983).

### 3. PENUTUP

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, jatuh bangun dalam membangun peradabannya. Banyak gangguan-gangguan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan-gangguan itu tidak dapat mematahkan semangat untuk membangun bangsanya. Sebelum bangsa penjajah menginjakkan kaki dan menanamkan kekuasaannya, di Indonesia telah ada kerajaan lokal. Awal mula sejarah perpustakaan di Indonesia dirintis sejak zaman Majapahit yang berupa perpustakaan kerajaan. Kemudian pada zaman penjajahan Hindia Belanda didirikan perpustakaan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* oleh Belanda di Jakarta sebagai usaha untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Untuk kepentingan penjajahnya, bangsa Belanda juga mendirikan perpustakaan-perpustakaan khusus guna menunjang berbagai lembaga penelitiannya disegala bidang. Pada saat itu pula didirikan penerbit. Penerbit yang pertama yaitu: *Commisie voor de Yolkslectuur* pada tahun 1908 yang sekarang namanya berganti menjadi *Balai Pustaka*. Pada zaman ini pula diberlakukan undang-undang tentang peraturan bahwa wajib serah karya cetak dengan peraturan pemerintah no.19. Pada akhir periode penjajahan bangsa Belanda, baru dikembangkan perpustakaan *volsbibliotheek* yang berfungsi sebagai taman bacaan untuk rakyat. Periode ini kemudian dianggap sebagai lahirnya perpustakaan umum di Indonesia, yang sebelumnya hanya ada perpustakaan kerajaan.

Berbeda dengan periode sebelumnya, pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia perpustakaan hampir dapat dikatakan tidak

berkembang sama sekali. Nanti setelah sesudah kemerdekaan terutama dalam rangka *nation and character building* perpustakaan di Indonesia mulai berkembang lagi. Sehubungan dengan usaha untuk pemberantasan buta huruf pada tahun 1957, didirikanlah perpustakaan rakyat di mana-mana. Pada periode ini juga merupakan berdirinya perpustakaan negara dan biro perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian menjadi pusat pengembangan perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasan untuk mendirikan perpustakaan nasional juga muncul pada masa ini.

Pada masa orde baru, perkembangan perpustakaan di Indonesia mengalami masa pembinaan dan pengembangan yang serius. Pelita demi Pelita, berbagai upaya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah berupa mendirikan proyek perintis perpustakaan sekolah, percetakan berbagai jenis buku paket untuk berbagai jenjang dan jenis sekolah, usaha penerbitan buku, ditingkatkannya peranan perpustakaan negara, dikembangkannya perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, dikoordinasikannya perpustakaan-perpustakaan khusus dalam bentuk jaringan kerjasama, dan dirintisnya berbagai upaya untuk mendirikan perpustakaan di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Sulistyo-Basuki. (1994). *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, Muljani A. (1983). *Sejarah perpustakaan dan perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.